

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan undang-undang perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam, adanya dua orang manusia dengan jenis kelamin berbeda mempunyai daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan anggota POLRI pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan di dalamnya baik anggota POLRI dan keluarganya maupun kesatuannya. Selain itu dalam penyelenggaraan sering terjadi ketidak lancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur di lingkungan POLRI. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis, serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya dan dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan sumber daya manusia yang mampu memecahkan

permasalahan bangsa dan dapat memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani.

Anggota POLRI harus mentaati peraturan dan memenuhi kewajiban dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, jika anggota POLRI akan beristri lebih dari satu hidup bersama dengan ikatan perkawinan yang sah anggota POLRI mempunyai peraturan-peraturan yang sedikit berbeda dengan masyarakat umum. Izin perkawinan diberikan kepada anggota POLRI yang bersangkutan apabila perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua calon suami-istri, yang rekomendasinya diberikan oleh pejabat agama (Rohaniawan Bintal) agar dapat menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda yang hendak melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang akan dilakukan menunjukkan prospek keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya serta tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya, yang rekomendasinya diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang.

Surat izin perkawinan hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bila perkawinan tidak jadi dilakukan setelah surat izin perkawinan diterbitkan dapat diperpanjang selama tiga bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari kasatker yang bersangkutan. Apabila izin perkawinan yang telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus melaporkan pembatalanya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki disertai dengan alasan

tertulis. Penolakan izin perkawinan dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dengan alasan-alasan tertentu bagi anggota POLRI antara lain:

1. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami atau istri tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.
2. Dalam perkawinan yang dilakukan akan mempengaruhi martabat POLRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik POLRI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkawinan merupakan suatu perintah sunah rosul merupakan kewajiban bagi manusia karena menyangkut hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Agar pusat pengembangan kependidikan dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan tata negara (Pkn-Tn) untuk membentuk *nation and character building* yang memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani. Keluarga terbentuk secara mutlak melalui perkawinan. Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan kerabat yang berkembang menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan unsur pertalian yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan pemuka agama. Aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Perkawinan bisa dilangsungkan menurut agama islam, agama kristen, agama budha, agama hindu dan menurut hukum adat yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah menyadari adanya keanekaragaman peraturan mengenai perkawinan, sehingga pemerintah berusaha mengadakan keragaman hukum perkawinan. Pemerintah mencoba menyusun suatu perundang-undangan yang bisa mencakup sepenuhnya dari peraturan perkawinan yang sudah berlaku dan berusaha menambahkan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

Penyelenggaraan pendidikan guru bidang studi pendidikan kewarganegaraan (PKn-Tn) dan tata negara, dengan kompetensi tambahan sosiologi dan antropologi yang selaras dengan tuntutan zaman, Kita sekarang telah mempunyai undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhenika Tunggal Ika”. Adanya undang-undang ini belum berarti bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pergaulan hukum adat dan undang-undang inipun juga belum berhasil untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam.

Nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan anggota POLRI diatur dengan tata tertib serta peraturan, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelang-

garan yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Keluarga yang memberikan dasar atau pondasi pendidikan bagi anak. Keluarga dibentuk melalui jenjang perkawinan yang merupakan lembaga yang diakui dengan sah oleh seluruh masyarakat sejak zaman dulu, sehingga masalah perkawinan akan selalu menjadi masalah yang menarik dalam kehidupan negara, di tengah-tengah masyarakat maupun dalam pencaturan hukum. Perkawinan ini dilakukan antara seorang wanita sebagai istri dan seorang pria sebagai suami. Dengan perkawinan yang sah akan terlaksana pergaulan hidup manusia secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang tertinggi diantara makhluk Tuhan yang lain.

Perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan emosional yang tidak kelihatan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka sedapat mungkin perceraian itu dihindarkan. Perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembahasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditambahi lagi. Ditegaskan pula bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama Pancasila.

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, adil, dan makmur, tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara tersebut sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, faktor pengadaan sarana, seperti listrik, air bersih, telepon, perumahan dan lain sebagainya. Namun semua itu masih ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan yaitu faktor keamanan.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Secara luas tanggung jawab memelihara keamanan suatu wilayah dan pemerintah dibebankan pada POLRI. Salah satu upaya yang dilakukan POLRI dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah

yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan diri warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu diantaranya adalah operasi ketupat, operasi lilin, operasi patuh dan juga operasi yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri misal operasi tegak rencong (dilaksanakan di aceh).

Guna menyukseskan operasi tersebut, POLRI menyiapkan anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin, kepribadian yang tinggi, serta memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional dan diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, agar mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. POLRI yang merupakan organisasi yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap anggota POLRI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama memelihara keamanan dan ketertiban dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme anggota agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral anggota POLRI melalui pembinaan mental dan juga kesadaran hukum yang tinggi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi masyarakat dan salah satu komponen dalam memelihara keamanan negara menghendaki setiap anggotanya memiliki disiplin yang tinggi yang dilandasi oleh keluhuran budi

pekerti sesuai dengan agamanya masing-masing. Kehidupan yang demikian harus diciptakan di lingkungan POLRI. Dalam kehidupan POLRI juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku di kalangan POLRI itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP). Mungkin akhir-akhir ini orang menganggap bahwa hukum militer POLRI itu cukup diketahui oleh kalangan POLRI saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut.

Dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Memperhatikan hal itu sebelum melaksanakan perkawinan, setiap anggota POLRI harus memenuhi yang ditentukan supaya tidak terjadi hal-hal tertentu yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan berpedoman undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Maka kepala staf POLRI mengeluarkan surat keputusan yang memberikan petunjuk tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota POLRI yaitu PERKAP No. 9 Tahun 2011 tanggal 19 maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini akan sangat berguna bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, khususnya anggota POLRI hendaknya benar-benar mempersiapkan diri melengkapi syarat-syarat pelaksanaan perkawinan dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya. Sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah ada atau pernah diteliti, oleh karena itu dengan adanya latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan melihat beberapa kasus pelaksanaan perkawinan anggota POLRI, maka penulis lebih tertarik menuangkan sebuah penulisan karya ilmiah yang berjudul “PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA POLRI: PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)”.

B. Perumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Perumusan masalah atau sering di istilahkan problematika merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya. Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Sehingga akan tercapai

tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota POLRI (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)?
2. Apa saja permasalahan perkawinan anggota POLRI (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)?
3. Bagaimana alternatif solusinya dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota POLRI (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah.

Dalam hubungannya dengan tujuan penelitian, Hamidi (2008:44) mengungkapkan bahwa “menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa yang sebenarnya hendak diteliti”. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini pada garis besarnya dapat terperinci dalam tujuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh data-data tentang pelaksanaan perkawinan bagi anggota POLRI.

- b. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai proses pelaksanaan perkawinan anggota POLRI.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota POLRI.
- d. Untuk Mengetahuai alternatif solusinya dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota POLRI.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan ini, ada 2 manfaat penelitian yang dapat digolongkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan pada khususnya mengenai proses pelaksanaan perkawinan anggota POLRI permasalahan dan alternatif solusinya.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai proses pelaksanaan perkawinan anggota POLRI permasalahan dan alternatif solusinya.
- c. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedikit diteliti.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menangani masalah-masalah perkawinan anggota POLRI supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sebagai calon pendidik, mengenai pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian sehingga dapat mentranformasikan kepada peserta didik, kelak tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Daftar Istilah

Menurut Maryadi, dkk., (2010:11), daftar istilah merupakan penjelasan dari istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Penjelasan istilah yang diambil dalam setiap kata kunci akan mempermudah untuk memahami isi yang ada didalamnya dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Pegawai Negeri pada POLRI adalah anggota POLRI dan pegawai negeri sipil (PNS) pada POLRI.

- c. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.